

# RENJA PERUBAHAN 2025



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN PONOROGO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Penyusun dapat merampungkan perumusan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025, sebagai landasan perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah. Kami menyadari bahwa tantangan dan kompleksitas pembangunan yang semakin tinggi memerlukan kerja keras dan sinergi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam Perubahan Rencana Kerja ini kami telah menetapkan program dan kegiatan yang komprehensif dan berorientasi pada hasil, yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Perubahan Rencana Kerja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas perencanaan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini kami sampaikan terima kasih. Akhirnya, semoga apa-apa yang tertuang dalam dokumen ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 24 Juni 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian Dan Pengembangan  
Kabupaten Ponorogo



Agus Sugianto, M.Si  
Pembina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 196804131988091002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Landasan Hukum .....	2
I.3. Maksud dan Tujuan.....	5
I.4. Dasar Pertimbangan Perubahan .....	5
I.5. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2025.....	7
II.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 .....	7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	21
III.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah .....	21
BAB IV PENUTUP .....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Format A.....	8
Tabel 3. 1 Format B.....	22

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun tema Pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar Penunjang Sarana Prasarana Perhubungan dan Peningkatan RTH, Penguatan UM yang didukung SDM serta Aparatur Professional”.

Acuan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo tahun 2025 adalah Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dan Perubahan RKPD Tahun 2025. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

## **I.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Negara Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo;
25. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
26. Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor: 00.7.2.4/1831/405.26/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

27. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo Nomor: 188.45/5381/405.27/2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025, sekaligus untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan dinamika kebutuhan aktual, kondisi fiskal, serta perubahan teknis yang terjadi.

Sedangkan tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029.
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang.
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi.
4. Pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah.
5. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

### **I.4. Dasar Pertimbangan Perubahan**

Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap RKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.
2. Efisiensi belanja program/kegiatan yang bersifat tupoksi dan prioritas dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi, dan efektifitas.

3. Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor: 00.7.2.4/1831/405.26/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

#### **I.5. Sistematika Penulisan**

Berikut adalah sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo tahun 2025 sesuai Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor: 00.7.2.4/1831/405.26/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025.

##### **BABI PENDAHULUAN**

Memuat/menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan, serta sistematika dokumen penyusunan Perubahan Renja.

##### **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Dilengkapi dengan matriks Format A (Terlampir).

##### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja. Dilengkapi dengan matriks Format B (Terlampir).

##### **BAB IV PENUTUP**

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

#### **II.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD sampai dengan Triwulan I tahun 2025. Evaluasi Renja dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

Dalam kurun waktu sampai dengan Triwulan I, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah capaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo pada tahun 2025.

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo dengan realisasinya dalam kurun waktu tertentu. Skala yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta.
2. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.
3. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Bappeda dan Narasumber yang kompeten.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut dari evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2025 hingga Triwulan I tahun 2025. Evaluasi ini menjadi dasar dalam merumuskan penyesuaian terhadap sasaran dan capaian program, kegiatan, serta sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2025 hingga Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Format A

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA  
RENJA PERANGKAT DAERAH BAPPEDA LITBANG KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021- 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (%)		PD Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	1.	Terwujudnya dukungan administratif dan operasional yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	4	Persentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana dan prasarana perangkat daerah yang memadai	95%	54.931.550.878,22	94%	26.409.625.248,00	90%	7.456.203.970,00	26%	1.928.590.856,00	-	-	-	-	-	-	12-8-9-10-11	13-6-12	14-13-8-100	15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	90%	167.890.250,00	90%	43.281.000,00	90%	15.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	0%	90%	18,00	8.656.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	67.156.100,00	4	26.105.000,00	1	10.000.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	0	4	80,00	5.221.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan













3.	Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah lintas bidang secara terpadu, konsisten, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	92%	9.498.022.878,32	92%	3.638.413.325,00	92%	1.164.377.180,00	8%	94.914.614,00	8%	94.914.614,00	100%	3.733.327.969,00	20,00	746.665.593,80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	92%	4.492.743.090,00	92%	2.259.165.718,00	92%	591.586.180,00	3%	18.277.483,00	3%	18.277.483,00	95%	2.277.443.201,00	19,00	455.488.640,20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir dan Dikurikulumkannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 Dokumen	805.873.200,00	7 Dokumen	351.696.056,00	1 Dokumen	60.786.180,00	1 Dokumen	13.877.483,00	1 Dokumen	13.877.483,00	8 Dokumen	365.573.539,00	80,00	73.114.707,80	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	170.576.494,00	4 Laporan	109.998.588,00	1 Laporan	18.150.000,00	1 Laporan	4.400.000,00	1 Laporan	4.400.000,00	5 Laporan	114.398.588,00	100,00	22.879.717,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan







4.	Tersedianya data, informasi, dan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang inovatif dan berbasis evidensi.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	90%	3.796.737.269,60	90%	2.014.578.858,00	90%	1.318.578.075,00	0%	4.779.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.779.500,00	0%	4.779.500,00	90%	2.019.355.358,00	18,00	403.871.071,60	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penyelenggaraan Peraturan	Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	90%	1.074.497.600,00	90%	392.792.657,00	90%	147.340.250,00	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	392.792.657,00	18,00	78.558.531,40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelibangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	0 Laporan	0,00	0	392.792.657,00	1 Laporan	147.340.250,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	392.792.657,00	-	78.558.531,40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
		Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan	Prosentase hasil penelitian yang dilaksanakan bidang sosial kependudukan	90%	1.007.341.500,00	90%	296.202.000,00	90%	398.613.000,00	0%	1.067.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.067.500,00	1.067.500,00	297.269.500,00	18,00	59.453.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	0 Dokumen	0,00	1	296.202.000,00	1 Dokumen	398.613.000,00	1	1.067.500,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.067.500,00	1.067.500,00	297.269.500,00	-	59.453.900,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	



## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor: 00.7.2.4/1831/405.26/2025 tanggal 10 April 2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan serta bidang penelitian dan pengembangan, Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo mengemban dua urusan pemerintahan daerah yaitu Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini bertujuan untuk menyesuaikan program, kegiatan, dan sub kegiatan agar lebih responsif terhadap dinamika pembangunan, evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, serta memperhatikan arah kebijakan nasional dan daerah yang terkini.

Adapun Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan oleh Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo dalam Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Format B

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025  
KABUPATEN PONOROGO**

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)		Target				pagu				OPD Penanggung Jawab
		Sumula	Menjadi	Sumula	Menjadi	Renja 2025	Penjabaran APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Perubahan APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Perubahan APBD 2025	Perubahan Renja 2025	Perubahan APBD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	
	PERENCANAAN													
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana dan prasarana perangkat daerah yang memadai	Prosentase pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana dan prasarana perangkat daerah yang memadai	95%	95%	95%	7.293.180.770,00	7.656.774.870,00	7.656.774.870,00	7.656.185.970,00	10.721.262.975,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Prosentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	90%	90%	90%	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	25 Orang	25 Orang		180.000.000,00	92.480.000,00	92.480.000,00	92.480.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi perkantoran sesuai SOP	95%	95%	95%		583.468.000,00	573.468.000,00	573.468.000,00	450.732.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	79 Paket	79 Paket	79 Paket		150.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	74.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	24 Paket		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12870 Paket	12870 Paket	12870 Paket		148.468.000,00	148.468.000,00	148.468.000,00	178.468.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	22.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedekahkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedekahkan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	164.092.170,00	194.092.170,00	194.092.170,00	185.839.270,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedekahkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedekahkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	77.450.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	Prosentase sarana dan prasarana yang terpenuhi	95%	95%	95%	415.000.000,00	502.040.000,00	502.040.000,00	498.540.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	28 Unit	200.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	248.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7 unit	7 unit	15.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	102.040.000,00	102.040.000,00	90.040.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan





		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	35.541.275,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
3		<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase keseluruhan dokumen perencanaan</b>	<b>Persentase keseluruhan dokumen perencanaan</b>	92%	92%	92%	1.662.586.180,00	1.431.586.180,00	1.431.586.180,00	1.314.377.180,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase usulan bidang sosial budaya yang diakomodir di dokumen perencanaan	Persentase usulan bidang sosial budaya yang diakomodir di dokumen perencanaan	92%	92%	92%	697.586.180,00	631.586.180,00	631.586.180,00	741.586.180,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	133.786.180,00	83.786.180,00	83.786.180,00	60.786.180,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	34.650.000,00	26.650.000,00	26.650.000,00	168.150.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	38.250.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	31.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	46.650.000,00	46.650.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase usulan yang diakomodir di dokumen perencanaan lingkup prasarana	74%	74%	74%	500.000.000,00	450.000.000,00	314.491.000,00	314.491.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	180.000.000,00	141.555.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	31.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	110.936.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	34.000.000,00	34.000.000,00	31.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								1.382.500.000,00	1.382.500.000,00	1.318.578.075,00	
4		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	90%	90%	90%	1.382.500.000,00	1.382.500.000,00	1.318.578.075,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan





## **BAB IV PENUTUP**

Pembangunan berorientasi pada masyarakat artinya adalah bahwa hasil pembangunan yang akan dicapai tersebut akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, selain itu resiko atau cost yang akan ditimbulkan oleh upaya pembangunan juga akan ditanggung oleh masyarakat. Dengan Demikian, tidak hanya benefit yang harus diketahui semenjak program pembangunan direncanakan, tetapi juga cost-nya.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun di samping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2025, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya dari Bappeda Litbang, dan juga jumlah dana yang diperlukan jika perencanaan tersebut dilaksanakan.

Harapannya adalah Perubahan Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ponorogo, 24 Juni 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  
Penelitian Dan Pengembangan  
Kabupaten Ponorogo

  
Dr. Agus Sugarto, M.Si  
Rebina Utama Muda / (IV/c)  
NIP. 196804131988091002